

# SIARAN PERS

Nomor: 10/HMS/SP/V/2026

**TANGGAL:**  
8 Mei 2026

## **Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan SMK Negeri 1 Limboto Bahas Pendidikan Demokrasi dan Kerawanan Pemilih Pemula di Era Digital**

**Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo** – Bawaslu Kabupaten Gorontalo melaksanakan Konsolidasi Demokrasi bersama para guru dan staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Limboto usai kegiatan Apel Pengawasan Partisipatif, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi antara Bawaslu dan lingkungan pendidikan dalam memperkuat pendidikan demokrasi, kesadaran kepemiluan, serta pengawasan partisipatif bagi generasi muda.

Kepala SMK Negeri 1 Limboto, Ruslan Payu, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap hubungan baik antara lembaga pendidikan dan penyelenggara Pemilu dapat terus terjalin.

Menurut Ruslan, SMK Negeri 1 Limboto memiliki sekitar 900 siswa yang dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi pemilih pemula sehingga pendidikan demokrasi menjadi hal penting untuk diperkuat sejak dini. “Hubungan baik ini perlu terus dijaga agar dapat meningkatkan kesadaran kepemiluan di lingkungan sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Limboto,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi kali ini lebih mengedepankan diskusi bersama para guru dan staf sekolah guna menghimpun berbagai masukan terkait kepemiluan dan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal memperkuat kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan SMK Negeri 1 Limboto dalam berbagai program pendidikan politik dan kepemiluan.

Dalam kesempatan itu, Alexander menyoroti kerawanan pemilih pemula di era digital. Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan game di kalangan generasi muda berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memengaruhi pilihan politik melalui pemberian uang maupun item dalam permainan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa agar tidak mudah dipengaruhi praktik-praktik yang merusak demokrasi. “Kesadaran politik yang diberikan kepada siswa akan menjadi bekal penting agar mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Selain itu, siswa juga dapat menjadi pengawas partisipatif di lingkungan masing-masing,” ujar Alexander.

Selain itu, Alexander juga mengingatkan bahwa sekolah sebagai fasilitas negara harus tetap dijaga netralitasnya dan tidak boleh digunakan sebagai lokasi kampanye maupun sarana mendulang suara dalam Pemilu dan Pemilihan.

Ia turut menyoroti pemasangan baliho atau alat peraga kampanye di sekitar lingkungan sekolah yang dinilai berpotensi melanggar aturan. “Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian bersama, meskipun tidak dipasang langsung di dalam lingkungan sekolah,” jelasnya.

Dalam sesi diskusi, para guru turut menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan Pemilu dan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Salah satu guru, Irfan, menyampaikan gagasan penggunaan sistem aplikasi berbasis lokal host atau pemilu berbasis teknologi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut dapat membantu mengurangi biaya dan waktu penyelenggaraan Pemilu.

Menanggapi hal itu, Alexander Kaaba menyampaikan bahwa sistem aplikasi dalam Pemilu memang dapat mendukung efisiensi penyelenggaraan. Namun, menurutnya, kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, dan sumber daya manusia masih perlu dipersiapkan secara matang.

Meski demikian, ia mengapresiasi masukan tersebut dan menilai gagasan penyederhanaan sistem kepemiluan relevan dengan semangat efisiensi saat ini. Alexander juga mencontohkan bahwa SMK Negeri 1 Limboto telah menerapkan sistem

e-voting dalam pemilihan Ketua OSIS yang dapat menjadi contoh edukasi demokrasi berbasis teknologi dalam skala kecil.

Selain itu, guru lainnya, Hendra, turut menanyakan terkait keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam proses Pemilu dan Pemilihan serta langkah pengawasan yang dilakukan Bawaslu apabila ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Zulfikar A. Uba, menegaskan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku, termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan aparat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.

“Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan di lingkungan masing-masing,” ujar Zulfikar.

Di akhir kegiatan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo kembali mengajak para guru untuk terus memberikan pemahaman kepemiluan kepada siswa sebagai upaya membangun generasi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan berintegritas.

**Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:**

**Divisi Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo**

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo

Email: [humasbawaslukabgor@gmail.com](mailto:humasbawaslukabgor@gmail.com)

Situs: [gorontalokab.bawaslu.go.id](http://gorontalokab.bawaslu.go.id)